



**PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH**

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan Pemerintahan Negara dan Pembangunan Nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terbagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara dalam Rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan ketentuan pada peraturan-peraturan tersebut, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan Pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan bagi BLUD ditambah Laporan Perubahan Anggaran Saldo Lebih (LPSAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi yang akurat dan transparan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan pelaksanaan anggaran untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU No. 17/2023, UU No. 1/2004, PP No. 12/2019, PP No. 71/2010, Perda No. 03/2022, Perbup No. 50/2022, Perbup No. 51/2022.

Maksud dari laporan keuangan ini adalah:

- a. *Menunjukkan Transparansi Keuangan*: Menyediakan gambaran yang jelas tentang pengelolaan keuangan dan sumber daya yang dikelola, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.
- b. *Memperkuat Akuntabilitas*: Memberikan bukti bahwa semua transaksi keuangan telah diproses dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta menunjukkan tanggung jawab pengelola keuangan dalam menjalankan amanah yang diberikan.
- c. *Menggambarkan Kinerja Keuangan*: Menyajikan hasil pencapaian target anggaran, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, untuk memberikan wawasan mengenai efektivitas penggunaan anggaran.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan ini meliputi beberapa aspek penting sebagai berikut:

- a. *Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas*: Laporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga semua pemangku kepentingan dapat memahami dan mengevaluasi kinerja keuangan SKPD.
- b. *Memberikan Informasi yang Relevan dan Akurat*: Menyediakan data keuangan yang relevan, akurat, dan lengkap mengenai sumber daya ekonomi, posisi dan kondisi keuangan, perubahan dan potensi keuangan serta realisasi anggaran, aset, kewajiban, dan perubahan ekuitas untuk mendukung analisis dan evaluasi oleh pihak internal dan eksternal.

- c. *Mendukung Pengambilan Keputusan*: Menyajikan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, baik untuk perencanaan anggaran di masa depan maupun untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan saat ini.
- d. *Mematuhi Peraturan dan Standar Akuntansi*: Memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar akuntansi pemerintah, untuk menjaga integritas dan keandalan laporan.
- e. *Menilai Efektivitas Pengelolaan Anggaran*: Menyediakan ikhtisar mengenai pencapaian target anggaran dan evaluasi atas perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut.
- f. *Mencerminkan Kinerja Keuangan*: Menggambarkan hasil dari pengelolaan keuangan selama periode laporan, serta menyajikan informasi yang diperlukan untuk memahami pencapaian dan hambatan yang ada dalam pelaksanaan anggaran.

Dengan adanya laporan keuangan ini, diharapkan dapat menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan /ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi keuangan SKPD di Kabupaten Lombok Tengah dan mendukung upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran di masa yang akan datang.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan kegiatan SKPD Kabupaten Lombok Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: *Anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*);

2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Indonesia Nomor 47;
3. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang di haruskan dan dianjurkan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang di perlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Kebijakan Keuangan
- 2.2. Indikator pencapaian target kinerja Keuangan

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 1.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD/BLUD
- 1.2. Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- 1.4. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang adadalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD/BLU

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.4. Penjelasan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN

BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR
PENCAPAIAN TARGET IKHTISAR dan KINERJA KEUANGAN

2.1 KEBIJAKAN KEUANGAN

Dalam penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2024 disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 dan APBD Perubahan disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2024.

Terkait dengan Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran Murni	Anggaran setelah Perubahan	Kenaikan / Penurunan	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6 = (5/3)*100
I	Pendapatan	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	-
II	Belanja				
1	Belanja Pegawai	3.899.478.303	3.918.283.055	18.804.752	0,48
2	Belanja Barang dan Jasa	1.017.931.023	1.031.770.623	13.839.600	1,36
3	Belanja Modal	231.457.499	230.989.499	468.000	-0,20
	Jumlah Belanja	5.148.866.825	5.181.043.177	32.176.352	0,62
	Deficit/Surplus	-5.148.866.825	-5.181.043.177	-32.176.352	0,62

Menyikapi Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan adanya perubahan APBD Tahun 2024 tersebut diatas, beberapa strategi yang ditempuh oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah, dengan melakukan kebijakan antara lain:

Upaya penghematan Belanja, dengan melakukan kebijakan antara lain:

- a. Menghemat penggunaan listrik, air, dan alat tulis kantor.
- b. Mengurangi perjalanan dinas yang tidak esensial dan memaksimalkan pertemuan daring.
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
- d. Mengembangkan mekanisme pelaporan dan evaluasi rutin untuk menilai efektivitas pengeluaran.

Ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan menjadi faktor pembatas dalam mewujudkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

- a. Realisasi anggaran yang tidak sesuai rencana.
- b. Tertundanya program dan kegiatan.
- c. Kurangnya fleksibilitas dalam penggunaan anggaran.

2.2 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SKPD Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, dan mendukung berbagai kegiatan operasional lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kabupaten Lombok Tengah. Semua ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam konteks penganggaran berdasar Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 pada masing-masing program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu:

1) Program Pembinaan Perpustakaan

Tujuan Program ini adalah peningkatan sarana perpustakaan dalam kondisi baik, ketersediaan pustakawan, ketersediaan buku, dan peningkatan kunjungan perpustakaan. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 2 kegiatan

dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp. 643.123.060,00 terealisasi senilai Rp. 628.910.950,00 atau 97,94%

2) Program Pelestarian Naskah Kuno

Tujuan Program ini adalah melestarikan naskah kuno yang diserahkan. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp. 11.347.054,00 terealisasi senilai Rp. 11.143.500,00 atau 98,20%

3) Program Pengelolaan Arsip

Tujuan Program ini adalah pengelolaan arsip statis yang diklasifikasikan. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 2 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp. 163.126.258,00 terealisasi senilai Rp. 150.962.000,00 atau 92,54%

4) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Tujuan Program ini adalah melaksanakan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp. 15.958.244,00 terealisasi senilai Rp. 14.325.000,00 atau 89,76%

5) Program Perizinan Penggunaan Arsip

Tujuan Program ini adalah menerbitkan izin penggunaan arsip. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp. 1.040.000,00 terealisasi senilai Rp. 1.040.000,00 atau 100%

Ditinjau Dari konteks PP 71 Tahun 2010 terkait penyajian laporan keuangan sesuai SAP, target dan realisasi keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

Tabel 2.2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi Anggaran	% dari Anggaran
1	2	3	4	5	6 = (5/4)*100
I	Pendapatan	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	-
II	Belanja				
1	Belanja Operasi	4.917.409.326	4.950.053.678	4.866.938.944	98,32
1.1	Belanja Pegawai	3.927.618.303	3.918.283.055	3.861.250.033	98,54
1.2	Belanja Barang dan Jasa	989.791.023	1.031.770.623	1.005.688.911	97,47
2	Belanja Modal	231.457.499	230.989.499	223.855.600	96,91
2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156.457.499	155.989.499	148.911.000	95,46
2.2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	75.000.000	75.000.000	74.944.600	99,93
	Jumlah Belanja	5.148.866.825	5.181.043.177	5.090.794.544	98,26

Realisasi Belanja lebih rendah dari anggarannya senilai Rp. 5.090.794.544 atau 98,26%, disebabkan karena adanya penghematan belanja.

Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah atas pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam DPA/DPPA tahun anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.3. Realisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B poin	B poin	100
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Output : Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	8 laporan	8 laporan	100
		Outcome : Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	8 laporan	8 laporan	100
2	Andministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Output : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	37 orang	37 orang	100

		Outcome : Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100
3	Andministrasi Umum Perangkat Daerah	Output : Jumlah laporan	12 laporan	12 laporan	100
		Outcome : Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 laporan	12 laporan	100
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Output : Pelayanan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	100
		Outcome : Pelayanan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	100
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Output : BMD Kondisi Baik	1 unit	1 unit	100
		Outcome : BMD Kondisi Baik	1 unit	1 unit	100
II	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Peningkatan Kunjungan Perpustakaan	15%	25%	60
		Jumlah Perpustakaan	410	474	86
		Rasio Ketersediaan Pustakawan	15	15	100
		Rasio Ketersediaan Buku	85%	85%	100
		Presentase Sarpras Perpustakaan dalam Kondisi baik	100%	100%	100
		Jumlah Pengunjung layanan perpustakaan digital	1500	1500	100
		Perpustakaan digitalisasi	1	1	100
1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Output : Jumlah Layanan Perpustakaan rujukan yang dikembangkan tingkat Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi	8 Layanan	8 Layanan	100
		Jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan (eksemplar)	28500 Eksemplar	1359 Eksemplar	4
		Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan (eksemplar)	44586 Eksemplar	44586 Eksemplar	100
		Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota (orang)	8 Orang	40 Orang	500
		Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO20000 (layanan)	1 Layanan	1 Layanan	100
		Outcome : Grade Akriditasi Perpustakaan	A	B	50

2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	12 Lokus	12 Lokus	100
		Output	: Jumlah perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten /Kota yang dikembangkan	11 Perpustakaan	23 Perpustakaan	209
			Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten /Kota yang dipilih dan di Dukung Keempatannya	2 Orang	2 Orang	100
		Outcome	: Jumlah peserta lomba yang berkaitan dengan literasi	160 Orang	29 Orang	18
III	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan	3 Naskah	5 Naskah	166
1	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Output	: Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan	3 Naskah	5 Naskah	166
		Outcome	: Jumlah naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat yang dikembangkan untuk dilestarikan dan didayagunakan (eksemplar)	3 Naskah	5 Naskah	166
IV	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Cakupan Pengelolaan Kearsipan	85%	73%	85
1	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Output	: Jumlah arsip yang diklasifikasikan	162.708 Berkas	7280 Berkas	4
		Outcome	: Jumlah arsip statis yang dilakukan Akuisis, Pengolahan, Presrvasi dan Akses Arsip Statis	530 Arsip	530 Arsip	100
2	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Output	: Jumlah arsiparis yang dilatih	20 Orang	3 Orang	15
		Outcome	: Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota (laporan)	15 Laporan	33 Laporan	220
V	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		Persentase Arsip Terselamatkan	80%	80%	100
1	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10	Output	: arsip yang di musnahkan	4%	4%	100

	(Sepuluh) Tahun	Outcome : Jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun (arsip)	5.500 Berkas	5461 Berkas	99
VI	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Outcome : Jumlah izin penggunaan arsip yang diterbitkan	3 Izin	4 Izin	100
1	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup Di Kabupaten/Kota	Output : Jumlah izin penggunaan arsip yang diterbitkan	3 Izin	4 Izin	100
		Outcome : Jumlah daftar arsip hasil penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup (arsip)	3 Izin	4 Izin	100

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SECARA UMUM

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelayanan masyarakat yang secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati. Pencapaian Kinerja Keuangan tergambar pada pencapaian realisasi anggaran tahun 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2023.

Tabel 3.1. Pencapaian Realisasi Anggaran tahun 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2023

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi (Rp)		% Tahun 2024	
			Tahun 2024	Tahun 2023	Anggaran	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6 = (4/3)*100	7 = (4-5)/4*100
I	Pendapatan	-	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	-	
II	Belanja					
1	Belanja Pegawai	3.918.283.055	3.861.250.033	3.522.855.814	98,54	9
2	Belanja Barang dan Jasa	1.031.770.623	1.005.688.911	1.467.299.200	97,47	-46
3	Belanja Modal	230.989.499	148.911.000	42.700.000	64,47	71
	Jumlah Belanja	5.181.043.177	5.090.794.544	5.109.850.452	98,26	0,34

Dari sisi belanja, terdapat penghematan/efisiensi pengeluaran senilai Rp. 90.248.633,00 yaitu dari anggaran setelah perubahan senilai Rp. 5.181.043.177,00 terealisasi Rp. 5.090.794.544,00 atau 98,26%.

Capaian bagian belanja senilai 98,26% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai, Target anggaran setelah perubahan senilai Rp. 3.918.283.055,00 terealisasi senilai Rp. 3.861.250.033,00 atau 98,54%.
- b. Belanja Barang dan Jasa, Target anggaran setelah perubahan senilai Rp. 1.031.770.623,00 terealisasi senilai Rp. 1.005.688.911,00 atau 97,47%.
- c. Belanja Modal, Target anggaran setelah perubahan senilai Rp. 230.989.499,00 terealisasi senilai Rp. 148.911.000,00 atau 64,47%.

Dari sisi belanja, terjadi penurunan realisasi senilai 0,34%, yaitu dari Rp. 5.109.850.452,00 pada tahun 2023 menjadi Rp. 5.090.794.544,00 pada tahun 2024.

3.1. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam Pelaksanaan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah tidak terdapat hambatan dan Kendala dalam pelaksanaan pencapaian tersebut.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan sejak tahun 2016 juga telah mengalami perubahan.

4.1 ASUMSI DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

a. Asumsi Kemandirian Entitas;

Bahwa Unit Pemerintah Daerah sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk Menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan asset dan sumberdaya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidaknya program yang telah ditetapkan.

b. Asumsi Kestinambungan Entitas;

Berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksudkan untukmelakukan likuidasi.

c. Asumsi Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement);

Berarti bahwa Laporrnan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini

diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Satuan uang yang digunakan adalah rupiah.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Basis Akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan yang diberlakukan untuk setiap SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Basis Kas (cash basis) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.
- b. Basis Akrua (Accrual basis) untuk penyusunan Laporan Finansial
Basis Akrua untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis Akrua untuk Laporan Operasional, bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Sedangkan basis Akrua untuk Neraca, berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada Keuangan Daerah, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dibayar.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan menggunakan **nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah**. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan kurs Bank Indonesia pada tanggal transaksi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.3.1 Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang liquid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan.

4.3.2 Piutang/Tagihan ke Pihak Ketiga

Piutang merupakan hak atau klaim entitas pemerintah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Umur piutang dihitung sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan.

4.3.3 Persediaan

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa perlakuan persediaan sebagai berikut:

- a. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik diakhir periode
- b. Persediaan yang berasal dari pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan
- c. Persediaan yang berasal dari produksi sendiri dinilai berdasarkan biaya standar
- d. Persediaan yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar

- e. Saldo persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian akhir
- f. Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik dan perpetual.
- g. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

4.3.4 Pengukuran Aset Tetap secara Umum

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu asset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan asset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- b. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan asset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- c. Asset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat asset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- d. Dalam pengakuan asset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- e. Berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- f. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian
- g. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian asset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai asset tetap berdasarkan tetap pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.
- h. Pelepasan Aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan asset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Asset tetap yang diperoleh karena pertukaran dinilai sebesar nilai wajar asset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.

- i. Penghapusan asset tetap dilakukan jika asset tetap tersebut rusak berat, usang, hilang dan sebagainya. Penghapusan asset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- j. Perubahan nilai asset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

4.3.5 Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

4.3.6 Peralatan dan Mesin

- a. Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh alat-alat dan mesin sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.
- b. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.
- c. Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.

4.3.7 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

4.3.8 Jalan, Jaringan dan Instalasi

- a. Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan siap untuk digunakan.
- b. Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap untuk digunakan.
- c. Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun irigasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan.

4.3.9 Aset Tetap lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

4.3.10 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklas aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data aset lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi aset yang dilakukan antara pengurus barang Kabupaten Lombok Tengah dengan Bagian Aset Setda Kabupaten Lombok Tengah, karena aset

lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka aset ini direncanakan akan diajukan penghapusan.

4.3.11 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

4.3.12 Kewajiban Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA SKPD

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, maka beberapa penyesuaian telah dilakukan antara lain dengan pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca dan LRA. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

A. Laporan Realisasi Anggaran-(SKPD dan BLUD)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah Daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi pendapatan antara lain:

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah;
- b. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada kas daerah;
- c. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- d. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs Tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan;
- e. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang pendapatan. Apabila pengembalian/koreksi pendapatan terjadi setelah periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar (SiLPA);
- f. Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompoknya antara lain: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah yang menjadi beban Daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas Daerah;

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi Belanja antara lain:

- a. Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
 - b. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu: belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja bagi hasil-transfer.
 - c. Belanja Operasi diklasifikasikan atas: belanja pegawai, belanja barang, belanja jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
 - d. Belanja modal diklasifikasikan atas: belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan, penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

B. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah.

I.1. Aset Lancar

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar antara lain: Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Piutang Lainnya, dan Persediaan.

I.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat senilai nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi

rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

I.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat senilai nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

I.1.3. Piutang Pajak

Piutang pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Piutang pajak dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.

I.1.4. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar senilai nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan piutang retribusi dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi.

I.1.5. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun

berjalan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat senilai nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

I.1.6 . Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat senilai nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Majelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APIP.

I.1.7. Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

I.1.8. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat senilai biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

I.2. Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya.

I.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah dan perolehan deviden dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dikapitalisir kembali. Penyertaan modal pemerintah dicatat senilai harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 51% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud.

Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

I.2.2. Investasi Permanen Lainnya-Dana Bergulir

Investasi Permanen Lainnya adalah investasi permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan kepada kelompok masyarakat untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu dan kemudian disalurkan kembali. Investasi permanen lainnya dicatat senilai harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya. Investasi Dana Bergulir dinilai senilai jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

I.3. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah

atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

I.3.1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

I.3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola

meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

I.3.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

I.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, irigasi dan jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan

jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai jalan, irigasi dan jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

I.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan hewan/tanaman. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

I.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasi sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

I.3.7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis aset tetap pada tanggal laporan

keuangan. Dengan demikian penyusutan tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan ataupun keuntungan.

I.4. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana Cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lin-lain.

1.4.1. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai senilai nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

1.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah (aset tetap yang kondisinya rusak berat). Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan senilai nilai perolehannya. Terhadap Aset lain-lain tidak dilakukan penyusutan.

II. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

II.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

II.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan/pungutan Iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

II.1.2. Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan yaitu adanya pendapatan yang telah diterima oleh SKPD tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca, misalnya jasa giro atas rekening bank setiap bendaharawan uang di SKPD, pendapatan yang diterima oleh Bendaharawan Penerimaan belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.

II.2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

III. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

III.1. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA, Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

III.2. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

Pos ini terdiri dari:

- a) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang.
- b) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
- c) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.
- d) Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari seluruh Utang Jangka Panjang.

C. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2. Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

D. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut.

5.1. PENJELASAN ATAS POS - POS LRA

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA OPD pada TA 2024 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1. Pendapatan Lra

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	27.700,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	27.700,00

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPAD Yang Sah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.7. Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Uraian		2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		-	-	-	27.700
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	27.700
a	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	27.700
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	27.700
Jumlah		-	-	-	27.700

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil

5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus-Fisik

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus-Non Fisik

5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

5.1.2. BELANJA

Realisasi belanja daerah yang tertuang dalam perubahan APBD TA 2024 adalah sebesar Rp. 5.090.794.544,00 mencapai 98,26% dari anggaran belanja daerah TA 2024 sebesar Rp. 5.181.043.177,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.10. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Operasi	4.950.053.678	4.866.938.944	98,32	4.990.155.014
2	Belanja Modal	230.989.499	223.855.600	96,91	119.695.438
3	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-
4	Belanja Transfer	-	-	-	-
Jumlah		5.181.043.177	5.090.794.544	98,26	5.109.850.452

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi TA 2024 terealisasi sebesar Rp. 4.866.938.944,00 atau mencapai 98,32% dari anggaran Belanja Operasi TA 2024 sebesar Rp. 4.950.053.678,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.11. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	3.918.283.055	3.861.250.033	98,54	3.522.855.814
2	Belanja Barang Jasa	1.031.770.623	1.005.688.911	97,47	1.467.299.200
3	Belanja Bunga	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	-	-	-	-
5	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
Jumlah		4.950.053.678	4.866.938.944	98,32	4.990.155.014

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai TA 2024 terealisasi sebesar Rp. 3.861.250.033,00 atau mencapai 98,54% dari anggaran Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp. 3.918.283.055,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.12. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No	Uraian	2024			2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Pegawai	3.918.283.055	3.861.250.033	98,54	3.522.855.814	
	a	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.547.394.020	2.513.829.426	98,68	2.304.196.292
	1	Belanja Gaji Pokok PNS	1.890.909.504	1.871.269.560	98,96	1.727.052.500
	2	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	219.812.060	213.341.584	97,06	198.629.657
	3	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	83.265.700	83.150.000	99,86	104.370.000
	4	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	189.572.760	185.348.000	97,77	112.540.000
	5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	38.031.200	37.720.000	99,18	35.390.000
	6	Belanja Tunjangan Beras PNS	121.913.276	119.130.900	97,72	121.665.600
	7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.844.102	3.843.718	99,99	4.521.420
	8	Belanja Pembulatan Gaji PNS	45.418	25.664	56,51	27.115
	b	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.368.075.035	1.344.606.607	98,28	1.215.845.522
	1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.368.075.035	1.344.606.607	98,28	1.215.845.522
	c	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.814.000	2.814.000	100	2.814.000
	1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.814.000	2.814.000	100	2.814.000
	Jumlah		3.918.283.055	3.861.250.033	98,54	3.522.855.814

Sebab-sebab tingginya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2024 dan realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan kenaikan gaji 8% pada Tahun 2024.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa TA 2024 terealisasi sebesar Rp. 1.005.689.911,00 atau mencapai 97,47% dari anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp. 1.031.770.623,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.13. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Barang dan Jasa		1.031.770.623	1.005.688.911	97,47	1.467.299.200
1	Belanja Barang	540.636.623	539.322.950	99,76	1.142.458.248
	a Belanja Barang Pakai Habis	528.680.623	527.366.950	99,75	1.142.458.248
	1 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.659.752	5.653.000	99,88	5.915.908
	2 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	80.586.080	80.078.000	99,37	71.144.350
	3 Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.844.500	6.844.500	100,00	1.345.500
	4 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	-	-	-	593.000
	5 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.250.000	1.250.000	100,00	-
	6 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20.022.499	20.016.000	99,97	22.565.650
	7 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	33.486.591	33.005.050	98,56	65.000
	8 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000	3.000.000	100,00	2.500.000
	9 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	16.913.952	16.781.400	99,22	1.680.900
	10 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	9.704.931	9.685.000	99,79	33.921.340
	11 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.542.210	3.538.500	99,90	2.801.500
	12 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	758.700	757.500	99,84	-
	13 Belanja Obat-Obatan-Obat	3.389.488	3.388.000	99,96	1.694.600
	14 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	213.301.920	213.150.000	99,93	926.790.500
	15 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	130.220.000	130.220.000	100,00	71.440.000
	b Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	11.956.000	11.956.000	100,00	-
	1 Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	11.956.000	11.956.000	100,00	-
2	Belanja Jasa	338.403.100	313.903.561	92,76	243.633.648
	a Belanja Jasa Kantor	303.570.832	282.984.161	93,22	241.537.848

	1	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.200.000	1.200.000	100,00	-
	2	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	-	-	-	1.200.000
	3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	27.180.000	27.180.000	100,00	3.720.000
	4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	66.000.000	49.500.000	75,00	35.750.000
	5	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.628.000	1.628.000	100,00	-
	6	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4.800.000	4.800.000	100,00	19.200.000
	7	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	50.400.000	50.400.000	100,00	12.000.000
	8	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	48.000.000	48.000.000	100,00	24.000.000
	9	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	-	-	-	48.000.000
	10	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	200.000	-	-	-
	11	Belanja Tagihan Air	7.056.000	6.857.357	97,18	5.577.798
	12	Belanja Tagihan Listrik	36.251.712	36.087.500	99,55	35.085.000
	13	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.400.000	2.400.000	100,00	2.400.000
	14	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	50.160.000	50.159.955	100,00	49.408.300
	15	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.295.120	4.771.349	57,52	5.196.750
	b	Belanja luran Jaminan/Asuransi	864.000	864.000	100,00	864.000
	1	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	381.456	381.456	100,00	381.456
	2	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	482.544	482.544	100,00	482.544
	c	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.689.868	3.685.400	99,88	1.231.800
	1	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.689.868	3.685.400	99,88	1.231.800
	d	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	30.278.400	26.370.000	87,09	-
	1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	24.278.400	20.370.000	83,90	-
	2	Belanja Sosialisasi	1.500.000	1.500.000	100,00	-
	3	Belanja Bimbingan Teknis	4.500.000	4.500.000	100,00	-
3		Belanja Pemeliharaan	31.360.000	31.360.000	100,00	29.889.204
	a	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31.360.000	31.360.000	100,00	29.889.204

	1	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	22.500.000	22.500.000	100,00	22.469.204
	2	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.750.000	3.750.000	100,00	4.500.000
	3	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.110.000	5.110.000	100,00	-
	4	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	-	-	-	2.920.000
4		Belanja Perjalanan Dinas	109.560.000	109.291.500	99,75	51.318.100
	a	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	109.560.000	109.291.500	99,75	51.318.100
	1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55.660.000	55.561.500	99,82	41.518.100
	2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	53.900.000	53.730.000	99,68	9.800.000
5		Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.810.900	11.810.900	100,00	-
	a	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.810.900	11.810.900	100,00	-
	1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	11.810.900	11.810.900	100,00	-
		Jumlah	1.031.770.623	1.005.688.911	97,47	1.467.299.200

Sebab-sebab tingginya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2024 dan realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Minimnya kendala administrasi dan kendala teknis dalam pelaksanaan belanja barang dan jasa.
2. Tahun 2024, OPD mulai menggunakan SIPD RI, sehingga mekanisme monitoring dan evaluasi dapat mempercepat pelaksanaan belanja barang dan jasa.

5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal digunakan untuk membiayai pengadaan aset. Realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp. 223.855.600,00 atau mencapai 96,91% dari

anggaran Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp. 230.989.499,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.14. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tanah	-	-	-	-
2	Belanja Peralatan dan Mesin	155.989.499	148.911.000	95,46	42.700.000
3	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	75.000.000	74.944.600	99,93	76.995.438
Jumlah		230.989.499	223.855.600	96,91	119.695.438

Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut.

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Pada Tahun 2024 tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja modal Tanah.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2024 di realisasikan sebesar Rp. 148.911.000,00 atau mencapai 95,46% dari anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 155.989.499,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.15. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		155.989.499	148.911.000	95,46	42.700.000
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	34.575.639	29.968.500	86,68	-
	a Belanja Modal Alat Kantor	7.591.799	5.970.000	78,64	-
	1 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	7.591.799	5.970.000	78,64	-
	b Belanja Modal Alat Rumah Tangga	26.983.840	23.998.500	88,94	-
	1 Belanja Modal Mebel	26.983.840	23.998.500	88,94	-
2	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.641.760	3.067.000	84,22	-
	a Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	3.641.760	3.067.000	84,22	-
	1 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	3.641.760	3.067.000	84,22	-
3	Belanja Modal Komputer	117.772.100	115.875.500	98,39	42.700.000

	a	Belanja Modal Komputer Unit	46.548.000	46.430.000	99,75	-
	1	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	46.548.000	46.430.000	99,75	-
	b	Belanja Modal Peralatan Komputer	71.224.100	69.445.500	93,83	42.700.000
	1	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	53.189.300	52.523.000	98,75	-
	2	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	18.034.800	16.922.500	93,83	42.700.000
		Jumlah	155.989.499	148.911.000	95,46	42.700.000

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

1. Minimnya kendala administrasi dan kendala teknis dalam pelaksanaan belanja modal.
2. Tahun 2024, OPD mulai menggunakan SIPD RI, sehingga mekanisme monitoring dan evaluasi dapat mempercepat pelaksanaan belanja modal.

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 terealisasi sebesar Rp. 74.944.600,00 atau mencapai 99,93% dari anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar Rp. 75.000.000,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.18. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	75.000.000	74.944.600	99,93	76.995.438
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	75.000.000	74.944.600	99,93	76.995.438
	a Belanja Modal Bahan Perpustakaan Lainnya	75.000.000	74.944.600	99,93	76.995.438
	1 Belanja Modal Buku Umum	75.000.000	74.944.600	99,93	76.995.438
	Jumlah	75.000.000	74.944.600	93,83	76.995.438

Tinggi rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya hampir sama.

5.1.3. SURPLUS/(DEFISIT)-LRA

Realisasi Pendapatan TA 2024 sebesar Rp. 0,00, sehingga terjadi Defisit realisasi APBD sebesar Rp. 5.090.794.544,00 atau 98,26% dari anggaran sebesar Rp. 5.181.043.177,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.21. Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) LRA

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	-	-	-	-
2	Belanja	5.181.043.177	5.090.794.544	98,26	5.109.850.452
	Jumlah	-5.181.043.177	-5.090.794.544	98,26	-5.109.850.452

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas Per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

5.3.1. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya. Saldo Aset Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 6.501.762.679,00 dan Rp. 6.491.043.487,00. Berikut daftar rincian saldo Aset:

Tabel 5.29. Rincian Aset

No	Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)
1	Aset Lancar	1.075.500	864.500
2	Investasi Jangka Panjang	-	-
3	Aset Tetap	4.993.906.729	4.983.398.537
4	Properti Investasi	-	-
5	Aset Lainnya	1.506.780.450	1.506.780.450
Jumlah		6.501.762.679	6.491.043.487

Berikut rincian per item aset.

5.3.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, Piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 1.075.500,00 dan Rp. 864.500,00. Berikut daftar rincian Aset Lancar:

Tabel 5.30. Rincian Aset Lancar

No	Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)
1	Kas dan setara Kas	-	-
2	Piutang	-	-
3	Penyisihan Piutang	-	-
4	Beban dibayar dimuka	-	-
5	Persediaan	1.075.500	864.500
Jumlah		1.075.500	864.500

Berikut ini adalah rincian aset lancar.

5.3.1.1.1. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 1.075.500,00 dan Rp. 864.500,00. Persediaan tersebut merupakan persediaan barang pakai habis yang masih tersisa di SKPD berdasarkan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Berikut rinciannya.

Tabel 5.50 Persediaan

No	Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	1.075.500	864.500
Jumlah		1.075.500	864.500

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran(lampiran memuat saldo awal, pembelian, pengurangan dan saldo akhir,,)**

5.3.1.3. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap setelah penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 4.993.906.729,00 dan Rp. 4.983.398.537,00. Saldo Aset Tetap terdiri dari:

Tabel 5.52. Daftar Nilai Aset Tetap

No	Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)
1	Tanah	-	-
2	Peralatan dan Mesin	2.562.006.200	2.413.095.200
3	Gedung dan Bangunan	2.497.052.454	2.497.052.454
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	2.567.552.587	2.492.607.987
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Jumlah Aset Tetap sebelum penyusutan		
7	Akumulasi Penyusutan	-2.632.704.512	-2.419.357.104
	Jumlah	4.993.906.729	4.983.398.537

Rincian Aset Tetap berdasarkan objek Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebagai berikut;

5.3.1.3.1. Tanah

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebelum penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 2.562.006.200,00 dan Rp. 2.413.095.200,00. Rincian aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5.55 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.2	Peralatan Dan Mesin	2.562.006.200	2.413.095.200
1.3.2.02	Alat Angkutan	700.140.800	700.140.800
1.3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000	500.000
1.3.2.04	Alat Pertanian	93.250.000	93.250.000
1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	981.967.900	951.999.400
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	91.995.000	91.995.000
1.3.2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.067.000	-
1.3.2.08	Alat Laboratorium	37.500.000	37.500.000
1.3.2.10	Komputer	653.585.500	537.710.000

Peningkatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp. 148.911.000,00 dan pengurangan senilai Rp. 0,00 di sajikan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 5.56. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024

No	Uraian	Nilai (RP)
I	Saldo Awal	2.413.095.200
II	Penambahan	
1	Belanja Modal TA 2024	148.911.000
2	Mutasi antar OPD	-
3	Reklasifikasi Antar KIB	-
4	Aset yang yang di Peroleh dari Belanja Barang dan Jasa	-
5	Reklasifikasi dari Aset Lainnya/RR/RB	-
6	Aset Tetap Yang di Peroleh dai Hibah	-
7	Koreksi akibat Nomerasi Sistem SIMDA BMD	-
	Jumlah Mutasi Tambah	148.911.000
III	Pengurangan	
1	Aset yang dikeluarkan (Barang Habis Pakai berupa alat kebersihan) dan Barang diserahkan ke Masyarakat)	-
2	Ekstracomtabel	-
3	Dihibahkan ke masyarakat /Pihak Ke III dan Instansi Lain	-
4	Reklas ke KIB Lainnya	-
5	Mutasi antar OPD	-
6	Koreksi akibat Nomerasi Sistem SIMDA BMD	-
	Jumlah Mutasi Kurang	-
IV	Saldo Akhir	2.562.006.200

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Termasuk dalam bangunan dan gedung adalah teralis yang digunakan untuk sarana pendukung gedung tersebut.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 2.497.052.454,00 dan Rp. 2.497.052.454,00. Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5.57. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.3	Gedung dan Bangunan	2.497.052.454	2.497.052.454
1.3.3.01	Bangunan dan Gedung	2.407.322.454	2.407.322.454
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	89.730.000	89.730.000

Tidak ada penambahan maupun pengurangan pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada tahun 2024.

5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.2.502.607.987,00 dan Rp. 2.492.607.987,00. Rincian aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5.61 Aset Tetap Lainnya

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Lainnya	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	2.502.607.987	2.492.607.987
1.3.3.05	Bahan Perpustakaan	2.502.607.987	2.492.607.987

Faktor Penyebab Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap lainnya sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5.62 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024

No	Uraian		Nilai (RP)
I	Saldo Awal		2.492.607.987
II	Penambahan		
	1	Belanja Modal TA 2024	74.944.600
	2	Mutasi antar OPD	-
	3	Reklasifikasi Antar KIB	-
	4	Koreksi akibat Nomerasi Sistem SIMDA BMD	-
		Jumlah Mutasi Tambah	74.944.600
III	Pengurangan		
	1	Tidak memenuhi kriteria aset tetap/direklas ke beban barang dan jasa	-
	2	Reklasifikasi Antar KIB	-
	3	Extracomptable	64.944.600
	4	Mutasi antar OPD	-
		Jumlah Mutasi Kurang	64.944.600
IV	Saldo Akhir		2.502.607.987

5.3.1.3.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penyusutan Aset Tetap. Saldo Penyusutan aset tetap Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. -2.632.704.512,00 dan Rp. -2.419.357.104,00.

5.3.1.4. Properti Investasi

5.3.1.4.1. Properti Investasi Tanah

5.3.1.4.2. Properti Investasi Gedung dan Bangunan

5.3.1.4.3. Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi

5.3.1.5. Aset Lainnya

Saldo bersih Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.1.506.780.450,00 dan Rp.1.506.780.450,00. Saldo bersih Aset Lainnya Per 31 Desember 2023 Rincian Aset Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.64. Daftar Aset Lainnya

No	Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang/Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-
2	Kemitraan dengan Pihak III	-	-
	Akumulasi Penyusutan		
	Kemitraan dg Pihak III Netto		
3	Aset Tak Berwujud	-	-
4	Aset Lain-lain :		
	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	1.506.780.450	1.506.780.450
	Jumlah	1.506.780.450	1.506.780.450

5.3.2. Kewajiban

Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban di klasifikasi menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Nilai Kewajiban Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 95.938.078,00 dan Rp. 99.953.912,00. Rincian kewajiban sebagai berikut.

Tabel 5.65.Rincian Kewajiban

No	Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	95.938.078	99.953.912
2	Kewajiban Jangka Panjang	-	-
Jumlah		95.269.240	99.953.912

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Posisi kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 95.938.078,00 dan Rp. 99.953.912,00. Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

Tabel 5.66.Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)
1	Utang Belanja	95.938.078	99.953.912
Jumlah		95.269.240	99.953.912

5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**5.3.2.1.2. Utang Bunga****5.3.2.1.3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang****5.3.2.1.4. Pendapatan Diterima Dimuka****5.3.2.1.5. Utang Belanja dan Transfer**

Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 95.349.629,00 dan Rp. 99.953.912,00. Utang Belanja dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.69.Rincian Utang Belanja

No	Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	95.349.629	99.953.912
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	588.449	-
Jumlah		95.349.629	99.953.912

5.3.2.1.5.1. Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 95.349.629,00 dan Rp. 99.953.912,00. Berikut rincian utang belanja pegawai.

Tabel 5.70.Rincian Utang Belanja Pegawai

No	Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)
1	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	-	4.475.599
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan	95.349.629	95.478.313
Jumlah		95.349.629	99.953.912

5.3.2.1.5.2. Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 524.011,00 dan Rp. 0,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.71.Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)
1	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	524.011	-
Jumlah		524.011	-

5.3.3. EKUITAS

Nilai ekuitas akhir Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 6.405.824.601,00 dan Rp. 6.391.089.575,00. Nilai ekuitas meningkat senilai Rp. 15.403.864,00 atau sebesar 99,75% di bandingkan dengan saldo nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp. 6.391.089.575,00.

5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk kegiatan penyelenggaraan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 dan 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1. Pendapatan Daerah - LO

Pendapatan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 0,00 dan senilai Rp. 27.700,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LO yang diakui oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.73. Rincian Pendapatan – LO

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah – LO	-	27.700
Pendapatan Transfer – LO	-	-
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	-	-
Jumlah	-	27.700

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 0,00 dan Rp. 27.700,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LO yang diakui oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.74. Pendapatan Asli Daerah – LO

Uraian	2024	2023
Pendapatan Pajak Daerah – LO	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	-	-
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	-	-
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	-	27.700
Jumlah	-	27.700

Berikut rincian masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah yang sah yang dimaksud.

Tabel 5.75. Rincian Pendapatan Asli Daerah

Uraian		2024	2023
1	Pajak Daerah - LO	-	-
2	Retribusi Daerah - LO	-	-
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	-	-
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	-	27.700
	a Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	-	-
	b Jasa Giro	-	-
	c Pendapatan Remunerasi	-	-
	d Pendapatan Bunga	-	-
	e Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-
	f Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	27.700
	g Pendapatan Denda Pajak	-	-
	Jumlah	-	27.700

Berikut rincian lebih lanjut Pendapatan pajak Daerah LO:

5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

5.4.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp. 0,00 sedangkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 0,00 dan Rp. 27.700,00.

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO yang diakui oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.82. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO

Uraian	2024	2023
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	-	27.700
Jumlah	-	27.700

5.4.1.2. Pendapatan Transfer - LO

5.4.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan - LO

5.4.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO

5.4.1.2.3. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO

5.4.2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 4.867.251.955,00 dan Rp. 5.277.728.028,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban yang diakui oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.92. Rincian Beban

Uraian	2024	2023
1 Beban Operasional	5.076.059.518	5.277.728.028
2 Beban Transfer	-	-
3 Beban Tak Terduga	-	-
Jumlah	5.076.059.518	5.277.728.028

3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.814.000	2.814.000
	a Belanja Honorarium	2.814.000	2.814.000
	Jumlah	3.856.041.350	3.522.855.814

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Adanya kebijakan kenaikan gaji 8%
 - b. Perubahan pegawai
2. Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2024 ini **lebih kecil** dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2024 sebesar Rp. 4.604.283,00 (Rp. 3.861.250.033,00 – Rp. 3.856.645.750,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.95. Penjelasan Selisih Beban Pegawai LO

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	4.604.283
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Beban LO:	
Utang Gaji dan Tunjangan	0
Utang Tambahan Penghasilan PNS	95.349.629
Pengurangan Beban LO:	
Utang Belanja Pegawai (N-1)	
Utang Gaji dan Tunjangan	4.475.599
Utang Tambahan Penghasilan ASN	95.478.313
Jumlah Penjelasan Selisih	4.604.283

5.4.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Nilai beban barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 masing-masing senilai Rp. 1.006.066.360,00 dan Rp. 1.467.299.200,00. Rincian Nilai Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.96 Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian		2024	2023
1	Beban Barang	539.111.950	1.142.458.248
	a Beban Barang Pakai Habis	527.366.950	1.142.458.248
	b Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	11.956.000	-
2	Beban Jasa	314.492.010	243.633.648
	a Beban Jasa Kantor	283.572.610	241.537.848
	b Beban Iuran Jaminan/Asuransi	864.000	864.000
	c Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.685.400	1.231.800
	d Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	26.370.000	-
3	Beban Pemeliharaan	31.360.000	29.889.204
	a Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31.360.000	29.889.204
4	Beban Perjalanan Dinas	109.291.500	51.318.100
	a Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	109.291.500	51.318.100
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.810.900	-
	a Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.810.900	-
Jumlah		1.006.066.360	1.467.299.200

Belanja Barang dan Jasa – LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi senilai Rp. 1.005.688.911,00. Sedangkan Realisasi Beban Barang dan Jasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp. 1.006.066.360,00.

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Penghematan belanja
2. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2024 sebesar Rp. 377.449,00 (Rp. 1.487.299.200,00. – Rp. 1.006.688.911,00). Hal tersebut disebabkan

perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.97 Penjelasan Selisih Beban Barang dan Jasa-LO

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	377.449
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Beban LO:	
Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan (Neraca)	588.449
Penggunaan Persediaan Barang Tahun 2023	864.500
Pengurangan Beban LO:	
Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023	-
Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)	1.075.500
Jumlah Penjelasan Selisih	377.449

5.4.2.2. Beban Bunga - LO

5.4.2.3. Beban Subsidi

5.4.2.4. Beban Hibah - LO

5.4.2.5. Beban Bantuan Sosial - LO

5.4.2.6. Beban Penyisihan Piutang

5.4.2.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan amortisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 dan 2023 senilai masing-masing Rp. 213.347.408,00 dan Rp. 293.485.471,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.105 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian		2024	2023
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	163.406.360	243.544.423
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	49.941.048	49.941.048
Jumlah		213.347.408	293.485.471

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Adanya belanja modal pada tahun 2024.
2. Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2024 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 dalam Neraca per 31 Desember 2024 diungkapkan dalam CaLK.

5.4.3. Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional

Berdasarkan Pendapatan dan Beban Operasional yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui Surplus Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai masing-masing Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 terdiri dari:

Tabel 5.111 Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Uraian		2024	2023
1	Pendapatan - LO	-	27.700
2	Beban - LO	5.076.059.518	5.277.728.028
Surplus/(Defisit) Operasional		-5.076.059.518	-5.277.700.328

5.4.4. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional menghasilkan Surplus/(Defisit) dari kegiatan Non Operasional yang terdiri dari:

1. Surplus Non Operasional
2. Defisit Non Operasional

5.4.5. Pos Luar Biasa

5.4.6. Surplus/(Defisit) - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang dihitung dari:

Tabel 5.116 Rincian Surplus/(Defisit) – LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kegiatan Operasional		
➤ Pendapatan Daerah – LO	-	27.700
✓ Pendapatan Asli Daerah – LO	-	27.700
✓ Pendapatan Transfer – LO	-	-
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	-	-
➤ Beban Operasional	5.076.059.518	5.277.728.028
✓ Beban Operasional	5.076.059.518	5.277.728.028
➤ Beban Transfer	-	-
✓ Beban Transfer	-	-
Surplus/(Defisit) dari kegiatan Operasional	-5.076.059.518	-5.277.700.328
Kegiatan Non-Operasional		
➤ Surplus Non-Operasional	-	-
✓ Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	-	-
✓ Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya – LO	-	-
➤ Defisit Non-Operasional	-	-
✓ Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	-	-
✓ Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	-	-
Surplus/(Defisit) Non Operasional	-	-
Pos Luar Biasa	-	-
✓ Pendapatan Luar Biasa	-	-
✓ Beban Luar Biasa	-	-
Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa	-	-
Jumlah	-5.076.059.518	-5.277.700.328

5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1. Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.131 Ekuitas Awal - LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Ekuitas Awal	6.391.089.575	6.558.967.151

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 2023 dan 2022 pada **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

5.6.2. Surplus/(Defisit)-LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.132 Surplus/(Defisit)-LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	- 5.076.059.518	- 5.277.700.328
Surplus/(Defisit) dari kegiatan Non Operasional	-	-
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	-	-
Surplus/(Defisit) – LO	- 5.076.059.518	- 5.277.700.328

Pada Tahun 2024 dan 2023 **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** masing-masing memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional dan non operasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024. Saldo

Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada *point 5.4.6*.

5.6.3. R/K PPKD

Akun R/K PPKD digunakan untuk mencatat ekuitas pemerintah daerah yang berada dan dicatat pada setiap SKPD untuk dikonsolidasikan. Nilai R/K PPKD yang akan dikonsolidasikan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing senilai Rp. 5.090.794.544,00 dan Rp. 5.109.822.752,00.

5.6.4. Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Dinas/Badan/Kantor Per 31 Desember 2024 dan 2023.

Tabel 5.141 Rincian Ekuitas Akhir

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo Ekuitas Akhir	6.405.824.601	6.391.089.575

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca *Point 5.3*.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. GAMBARAN UMUM OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berperan sebagai unsur pelaksana kewenangan otonomi daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan. Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 70 Tahun 2016, yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lombok Tengah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang di jelaskan di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis Perpustakaan dan Kearsipan.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.2. SUMBER DAYA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah, hingga bulan Desember 2024 sebanyak 41 (empat puluh satu) orang. Berikut data pegawai berdasarkan pangkat/golongan dan tingkat pendidikan:

Tabel 6.1 Data Pegawai berdasarkan Pangkat dan Pendidikan

NO	ESELON	PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN					KET
			SMA	D3	S1	S2	S3	
1	IIb	Pembina Tk. I/IVc				1		
2	IIIa	Pembina Tk. I/IVb				1		
3	IIIb	Pembina Tk. I/IVa				1		
4	Staf Fungsional / Umum	Pembina (IV/a)				2	1	
		Penata III/d			4			
		Penata III/c			3	1		
		Penata Muda III/b			5			
		Penata Muda III/a	1	1	6			
		Pengatur II/d	1	1				
		Pengatur II/c	3	2				
		Pengatur Muda II/b	1					
5	Tenaga Honorer	-	4		2			
Jumlah			41					

BAB VI
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan CALK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 secara keseluruhan.

Praya, Januari 2025

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Drs. H. LALU MULIAWAN, MM

NIP. 19670511 199702 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH**

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN TH 2024

JURNAL UMUM DAN PENYESUAIAN

No	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
1	2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air		-
	2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik		-
	2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		-
	8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	-	
	8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	-	
	8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	
		Jurnal Penyesuaian atas pembayaran utang Barang dan Jasa Th 2023 di Tahun 2024		
2	8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	588.449	
	8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik		
	8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		
		Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air		588.449
		Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik		
		Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		
		Jurnal Penyesuaian atas pengakuan adanya utang Barang dan Jasa Th 2024 dan Belum di Bayar sd Desember 2024 yang akan di bayarkan di tahun berikutnya		
3	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan	95.478.313	-
	8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	-	95.478.313
		Jurnal Penyesuaian atas pembayaran utang TPP Th 2023 yang dibayarkan Tahun 2024		
4	2.1.06.01.02.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	95.349.629	
	8.1.01.02.01.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		95.349.629
		Jurnal Penyesuaian atas pengakuan adanya utang TPP Th 2024 dan Belum di Bayar sd Desember 2024 yang akan di bayarkan di tahun berikutnya		
5	2.1.06.01.01.0001	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	4.309.800	-
	2.1.06.01.01.0003	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	165.730	-
	2.1.06.01.01.0007	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS		-
	2.1.06.01.01.0013	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS		-
	2.1.06.01.01.0015	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	69	-
	8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	-	4.309.800
	8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	-	165.730
	8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	-	
	8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	-	
	8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	-	69
		Jurnal Penyesuaian atas pembayaran utang gaji dan tunjangan pegawai Th 2023 yang dibayarkan Tahun 2024		
6	8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS		
	8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS		
	8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS		
	8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		
	8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS		
	2.1.06.01.01.0001	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS		
	2.1.06.01.01.0003	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS		
	2.1.06.01.01.0007	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS		
	2.1.06.01.01.0013	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS		
	2.1.06.01.01.0015	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS		
		Jurnal Penyesuaian atas pengakuan adanya utang gaji dan tunjangan pegawai Th 2024 dan Belum di Bayar sd Desember 2024 yang akan di bayarkan di tahun berikutnya		
7	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	1.075.500	-
	1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor		-
	8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	1.075.500
	8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	-	
		Jurnal Penyesuaian atas pengakuan sisa persediaan barang habis pada periode tahun berkenaan berdasarkan berita acara hasil opname persediaan (Contoh sisa Persediaan Per 31 Desember 2024)		
8	8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	864.500	-
	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	-	864.500
		Jurnal Penyesuaian atas pengakuan pemakaian sisa persediaan barang pakai habis pada periode tahun lalu yang digunakan tahun berkenaan (Contohnya sisa persediaan th 2023 yg di pakai pada tahun 2024)		
	8.1.08.01.02.0002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	49.998.473	
	1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		49.998.473
	8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	19.331.846	
	1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor		19.331.846
	8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.370.433	
	1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya		4.370.433
	8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	28.780.477	
	1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel		28.780.477
	8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.700.000	
	1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		8.700.000

BERITA ACARA REKONSILIASI

Pada hari ini **Senin** tanggal **20** Januari 2024 telah disenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan perubahan Ekuitas dan Neraca antara Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disebut pengguna Anggaran, dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku SKPKD, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah/PPKD. Pengguna Anggaran telah menyampaikan laporan/data sebagai bahan rekonsiliasi, berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran Sampai Dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2024
2. Laporan Operasional Sampai Dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2024
3. Laporan Perubahan Ekuitas Per Tanggal 31 Desember 2024
4. Neraca Per Tanggal 31 Desember 2024

Selanjutnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Selaku SKPKD menyediakan data transaksi dan laporan terkait yang diproses berdasarkan SP2D/STS dan bukti transaksi keuangan lainnya yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran. Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Kesalahan / ketidakcocokkan data yang tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi, akan dijadikan dasar perbaikan terhadap data dan laporan keuangan di kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

a.n. Kepala BKAD Selaku SKPKD
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



WIDYA ASTUTI, SE, M.Si
NIP. 19750302 200003 2 006

Praya, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pengguna Anggaran



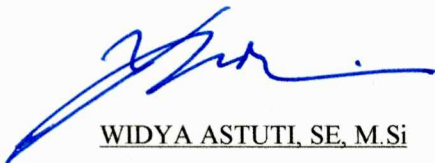
Drs. H. LALU MULIAWAN, MM
NIP. 19670511 199702 1 003

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LRA
 BULAN DESEMBER
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO URUT	URAIAN / RINCIAN POS-POS LRA	LRA Menurut		SELISIH	KOREKSI SELISIH (+/-)		LRA REKONSILIASI
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
4	Pendapatan Daerah	0	0	0			0
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0	0	0			0
4.1.01	Pajak Daerah	0	0	0			0
4.1.02	Retribusi Daerah	0	0	0			0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	0	0			0
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0	0			0
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	0	0			0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan	0	0	0			0
5	Belanja Daerah	5.090.794.544	5.090.794.544	0			5.090.794.544
5.1	Belanja Operasi	4.866.938.944	4.866.938.944	0			4.866.938.944
5.1.01	Belanja Pegawai	3.861.250.033	3.861.250.033	0			3.861.250.033
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.005.688.911	1.005.688.911	0			1.005.688.911
5.1.05	Belanja Hibah	0	0	0			0
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0			0
5.2	Belanja Modal	223.855.600	223.855.600	0			223.855.600
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	148.911.000	148.911.000	0			148.911.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0			0
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0	0			0
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0			0
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	0			0

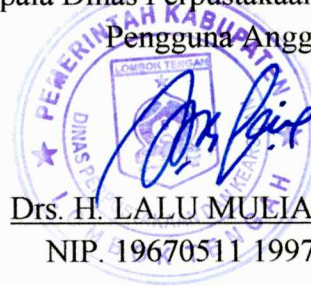
6	Pembiayaan Daerah	0	0	0			0
6.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	0			0
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	0	0			0

a.n. Kepala BKAD Selaku SKPKD
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



WIDYA ASTUTI, SE, M.Si
NIP. 19750302 200003 2 006

Praya, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pengguna Anggaran

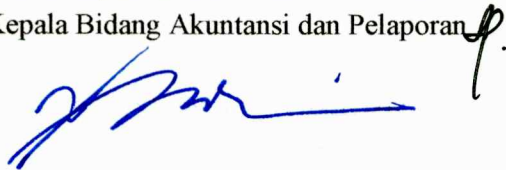


Drs. H. LALU MULAWAN, MM
NIP. 19670511 199702 1 003

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI NERACA
 BULAN DESEMBER
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO URUT	URAIAN / RINCIAN POS-POS NERACA	NERACA Menurut		SELISIH	KOREKSI SELISIH (+/-)		NERACA REKONSILIASI
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
1	Aset	6.501.762.679	6.501.762.679	0			6.501.762.679
1.1	Aset Lancar	1.075.500	1.075.500	0			1.075.500
1.1.01	Kas dan Setara Kas	0	0	0			0
1.1.02	Piutang	0	0	0			0
1.1.03	Penyisihan Piutang	0	0	0			0
1.1.04	Beban Dibayar Dimuka						
1.1.05	Persediaan	1.075.500	1.075.500				1.075.500
1.2	Investasi Jangka Panjang	0	0	0			0
1.2.01	Pendapatan Hibah	0	0	0			0
1.2.02	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan	0	0	0			0
1.3	Aset Tetap	4.993.906.729	4.993.906.729	0			4.993.906.729
1.3.01	Tanah	0	0	0			0
1.3.02	Peralatan dan Mesin	2.562.006.200	2.562.006.200	0			2.562.006.200
1.3.03	Gedung dan Bangunan	2.497.052.454	2.497.052.454	0			2.497.052.454
1.3.04	Jalan, irigasi, dan Jaringan	0	0				0
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	2.567.552.587	2.567.552.587				2.567.552.587
1.3.06	Konstruksi dalam Pengejaan	0	0	0			0
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	-2.632.704.512	-2.632.704.512				-2.632.704.512
1.4	Properti Investasi	0	0	0			0
1.5	Aset Lainnya	1.506.780.450	1.506.780.450	0			1.506.780.450
				0			
2	Kewajiban	95.938.078	95.938.078	0			95.938.078
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	95.938.078	95.938.078				95.938.078
2.2	Kewajiban Jangka Panjang						
6.1	Ekuitas	6.405.824.601	6.405.824.601	0			6.405.824.601
6.1.01	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	6.501.762.679	6.501.762.679	0			6.501.762.679

a.n. Kepala BKAD Selaku SKPKD
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



WIDYA ASTUTI, SE, M.Si
NIP. 19750302 200003 2 006

Praya, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pengguna Anggaran



Drs. H. LALU MULIAWAN, MM
NIP. 19670511 199702 1 003

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN OPERASIONAL
 BULAN DESEMBER
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO URUT	URAIAN / RINCIAN POS-POS LO	LO Menurut		SELISIH	KOREKSI SELISIH (+/-)		LO REKONSILIASI
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
1	Pendapatan Daerah - LO	0	0	0			0
2	Beban Daerah	5.076.059.518	5.076.059.518	0			5.076.059.518
2.1	Beban Operasi	5.076.059.518	5.076.059.518	0			5.076.059.518
2.1.01	Beban Pegawai	3.856.066.360	3.856.066.360	0			3.856.066.360
2.1.02	Beban Barang dan Jasa	1.006.066.360	1.006.066.360	0			1.006.066.360
2.1.07	Beban Penyusutan dan Amortisasi	213.347.408	213.347.408				213.347.408
2.2	Beban Transfer	0	0	0			0
1.3	Beban Tak Terduga	0	0	0			0
3	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	-5.076.059.518	-5.076.059.518	0			-5.076.059.518
4	Kegiatan Non Operasional	0	0				0
5	Pos Luar Biasa	0	0	0			0
6	Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	0	0	0			0
7	Surplus/Defisit LO	-5.076.059.518	-5.076.059.518	0			-5.076.059.518

Praya, 31 Desember 2024

a.n. Kepala BKAD Selaku SKPKD
 Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Pengguna Anggaran


 WIDYA ASTUTI, SE, M.Si
 NIP. 19750302 200003 2 006


 Drs. H. LALU MULIAWAN, MM
 NIP. 19670511 199702 1 003

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2024

NO URUT	URAIAN / RINCIAN POS-POS LO	LO Menurut		SELISIH	KOREKSI SELISIH (+/-)		LO REKONSILIASI
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
1	Ekuitas Awal	6.391.089.575	6.391.089.575	0			6.391.089.575
2	Surplus/Defisit LO	5.076.059.518	5.076.059.518	0			5.076.059.518
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	0	0	0			0
4	RK PPKD	5.090.794.544	5.090.794.544				5.090.794.544
5	Ekuitas Akhir	6.405.824.601	6.405.824.601	0			6.405.824.601

a.n. Kepala BKAD Selaku SKPKD
 Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan


WIDYA ASTUTI, SE, M.Si
 NIP. 19750302 200003 2 006

Praya, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Pengguna Anggaran



Drs. H. LALU MULIAWAN, MM
 NIP. 19670511 199702 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jl. Ahmad Yani No. 2 Praya Lombok Tengah, Kode Pos 83511

BERITA ACARA PEMERIKSAAN STOCK OPNAME BARANG HABIS PAKAI

Pada hari ini *Selasa**tanggal *tiga puluh satu** bulan *Desember**tahun 2024, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. H.Lalu Muliawan, MM
NIP : 19670511 199702 1 003
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007,kami melakukan pemeriksaan terhadap persediaan barang habis pakai kepada :

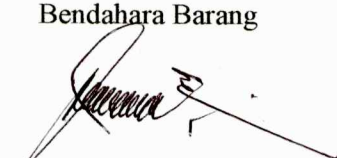
Nama : Muhamamd Zuhudin
NIP : 19750624 199403 1 003
Jabatan : Bendahara Barang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu,kami menemui kenyataan sebagai berikut. Jumlah barang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Kertas F4	2	rim	57.500	115.000
2	Kertas A4	4	rim	52.500	210.000
3	Snowman	2	kotak	60.000	120.000
4	Tinta printer (Epson)	4	buah	110.000	440.000
5	Tinta stempel	3	buah	16.000	48.000
6	Lem povinal	5	buah	23.500	117.500
7	Amplop putih	1	kotak	25.000	25.000
JUMLAH					1.075.500

Praya, 31 Desember 2024

Bendahara Barang


MUHAMMAD ZUHUDIN
NIP. 19750624 199403 1 003

Pemeriksa,
Pengguna Anggaran

Drs. H. LALU MULIAWAN, MM
NIP. 19670511 199702 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jl. Ahmad Yani No. 2 Praya Lombok Tengah, Kode Pos 83511

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN

Pada hari ini *Selasa** tanggal *tiga puluh satu** bulan *Desember** tahun 2024, telah dilakukan Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah oleh Tim pemeriksa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dengan perhitungan kas sebagai berikut:

Saldo buku yang ditetapkan			
Penerimaan periode 1 Januari s/d 31 Des 2024	Rp.	99.493.516	
Pengeluaran periode sama	Rp.	95.687.711	
Saldo buku			Rp. 3.825.805

Saldo kas Bendahara Pengeluaran, terdiri dari			
Uang tunai di brankas		Rp. 0	
Uang kertas	Rp.	0	
Uang logam	Rp.	0	
Uang di rekening		Rp. 0	
Jumlah kas			Rp. 0
Selisih kas			Rp. 0

Penjelasan atas selisih kas

Catatan :

RINCIAN UANG TUNAI

Terdiri dari

1. Uang Kertas	0 lembar @	Rp.	-	Rp.	-
			TOTAL	Rp.	-
2. Uang Logam	0 lembar @	Rp.	-	Rp.	-
			TOTAL	Rp.	-

Bendahara Pengeluaran
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Lombok Tengah

ZIADATIA AZMI, SE

NIP. 19910111 202203 2 003

Mengetahui,
Kepala Dinas

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Lombok Tengah



Drs. H. LALU MULIAWAN, MM

NIP. 19670511 199702 1 003

